



Pentingnya Mengoptimalkan Peran Intelijen Maritim TNI Angkatan Laut Guna Menangkal Ancaman Asimetris di Laut Natuna Utara

Dedyan Basnur^{*1}, Wahyu Sasono², Kristiyono³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: dedyanpanasutan@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-02 Keywords: <i>Maritime Intelligence;</i> <i>Asymmetric Threats;</i> <i>Indonesian Navy;</i> <i>North Natuna Sea;</i> <i>Interoperability;</i> <i>Maritime Security;</i> <i>Defense Strategy.</i>	Indonesia's maritime security in the North Natuna Sea faces increasingly complex challenges, encompassing not only conventional threats but also asymmetric ones such as maritime militia activities, illegal research operations, and Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. These conditions necessitate the optimization of the Indonesian Navy's maritime intelligence role as the frontline component of the national maritime defense system. This study aims to analyze the capabilities, challenges, and strategic approaches required to strengthen the Indonesian Navy's maritime intelligence in addressing asymmetric threats in the region. A qualitative method with a strategic case study approach was employed, involving in-depth interviews, field observations, and policy document analysis. Data were processed using NVivo for thematic mapping and the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) method to identify the organization's strategic position. The findings reveal three main issues: weak institutional interoperability among agencies, limited human resources and modern detection technologies, and the absence of specific maritime intelligence policies for asymmetric threat management. Based on the SWOT analysis, which places the Indonesian Navy's maritime intelligence in the Weakness-Threats (WT) quadrant, a defensive-adaptive strategy is recommended. This includes establishing an integrated maritime intelligence command center, developing real-time detection system integration, enhancing human resource competencies, and modernizing intelligence technologies to strengthen Indonesia's maritime resilience and sovereignty in the North Natuna Sea.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-02 Kata kunci: <i>Intelijen Maritim;</i> <i>Ancaman Asimetris;</i> <i>TNI Angkatan Laut;</i> <i>Laut Natuna Utara;</i> <i>Interoperabilitas;</i> <i>Keamanan Maritim;</i> <i>Strategi Pertahanan.</i>	Keamanan maritim Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks, tidak hanya bersifat konvensional tetapi juga asimetris, seperti aktivitas maritime militia, riset ilegal, dan praktik <i>Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing</i> . Kondisi ini menuntut optimalisasi peran intelijen maritim TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan maritim nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas, tantangan, dan strategi penguatan intelijen maritim TNI AL dalam menghadapi ancaman asimetris di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus strategis, mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan perangkat NVivo untuk pemetaan tematik dan metode <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)</i> guna mengidentifikasi posisi strategis organisasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga isu utama, yaitu lemahnya interoperabilitas kelembagaan antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi deteksi modern, serta belum adanya kebijakan intelijen maritim yang secara spesifik mengatur penanganan ancaman asimetris. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang menempatkan posisi intelijen maritim TNI AL pada kuadran <i>Weakness-Threats (WT)</i> , strategi yang direkomendasikan adalah defensif-adaptif melalui pembentukan pusat komando intelijen terpadu, integrasi sistem deteksi real time, peningkatan kompetensi SDM, dan modernisasi teknologi untuk memperkuat ketahanan serta kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara.

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.500 pulau dan terletak di jalur strategis *Sea Lines of Communication (SLOC)* internasional, memiliki posisi geopolitik yang sangat penting di kawasan Indo-Pasifik (Studies,

2022). Salah satu wilayah maritim paling vital adalah Laut Natuna Utara yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sesuai UNCLOS 1982. Kawasan ini memiliki potensi energi besar sekitar 127 juta barel minyak dan 46 triliun kaki kubik gas alam sekaligus menjadi

sasaran perhatian global karena tumpang tindih klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui konsep nine dash line yang mencakup sekitar 30% wilayah ZEE Indonesia.

Ancaman di Laut Natuna Utara kini tidak lagi bersifat militer konvensional, melainkan berkembang menjadi ancaman asimetris, seperti aktivitas maritime militia, nelayan asing yang dikawal coast guard RRT, kapal riset ilegal, dan praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* (Doe, 2023). Insiden-insiden sejak 2023, seperti gangguan terhadap survei seismik PT Pertamina dan masuknya kapal riset asing tanpa izin, memperlihatkan kompleksitas ancaman ini yang bersifat sistematis, sulit diprediksi, dan berimplikasi langsung terhadap kedaulatan serta stabilitas kawasan.

Dari sudut akademis, ancaman asimetris ini menegaskan pentingnya peran intelijen maritim dalam menjaga kedaulatan negara (Waters B, 2021). Dwicahyono menyoroti tiga faktor kerentanan Indonesia luasnya area pengawasan, fragmentasi pulau, dan keterbatasan peralatan deteksi seperti radar jarak jauh serta sensor AIS yang menyebabkan respons masih bersifat reaktif. Marliani (2024) menambahkan bahwa penanganan ancaman laut tidak cukup dengan pendekatan militer, tetapi memerlukan sinergi antara TNI AL, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Polair, serta sistem intelijen yang modern dan terkoordinasi.

Kajian tentang konflik laut dan keamanan maritim telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara khusus membahas optimalisasi intelijen maritim TNI AL dalam menghadapi ancaman asimetris di Laut Natuna Utara masih terbatas. Riset-riset sebelumnya, seperti oleh Dao et al. (2024) dan Panggabean (2025), belum mengulas secara mendalam peran intelijen maritim TNI AL sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pengelolaan informasi strategis. Hal ini menegaskan adanya *research gap* penting yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Penelitian berfokus pada kawasan Laut Natuna Utara di wilayah operasi Koarmada I, dengan subjek unsur intelijen maritim TNI AL seperti Pusintelal, Lanal Ranai, dan elemen intelijen operasional di bawah Koarmada I. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan perangkat deteksi modern, rendahnya interoperabilitas antar lembaga, serta belum adanya kebijakan intelijen khusus untuk mitigasi ancaman asimetris di kawasan terpencil.

Sebagai perwira TNI AL, peneliti memiliki kedekatan operasional dengan locus penelitian dan menilai secara langsung bahwa respons terhadap ancaman asimetris masih cenderung reaktif akibat lemahnya integrasi intelijen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana intelijen maritim TNI AL dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi sistem deteksi modern, penguatan koordinasi antar lembaga, dan strategi intelijen proaktif guna memperkuat ketahanan maritim nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus strategis untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai penguatan sistem intelijen maritim TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman asimetris di Laut Natuna Utara (Matthew B. Miles and Johnny Saldaña, 2014). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan militer di kawasan strategis tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di wilayah tanggung jawab Koarmada I, dengan fokus pada satuan intelijen TNI AL seperti Pusintelal, Lanal Ranai, dan elemen intelijen operasional lainnya, serta melibatkan Bakamla, KKP, dan Polair sebagai lembaga pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka, lalu dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, dan interpretasi data menggunakan analisis tematik Miles, Huberman & Saldaña (2014). Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking, peer debriefing, audit trail, serta keterlibatan lapangan yang memadai (Creswell, 2018).

Unit analisis penelitian mencakup empat level individu, organisasi, wilayah, dan waktu untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan aplikatif. Level individu berfokus pada perwira dan personel intelijen TNI AL yang berpengalaman langsung di Laut Natuna Utara, sementara level organisasi mencakup TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair dalam konteks interoperabilitas kelembagaan. Level wilayah menyoroti Laut Natuna Utara sebagai kawasan strategis yang rawan terhadap ancaman seperti IUU *fishing*, *maritime militia*, dan riset ilegal, sedangkan level waktu difokuskan pada periode 2023–2025 ketika intensitas ancaman meningkat. Pengumpulan data dilakukan secara

komprehensif melalui wawancara semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap laporan operasi, doktrin, dan regulasi terkait. Seluruh data diolah secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak NVivo (Lakeman, 2008), sehingga menghasilkan analisis yang valid dan mendalam untuk merumuskan rekomendasi strategis penguatan intelijen maritim TNI AL di Laut Natuna Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem intelijen maritim TNI AL di Natuna masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, antara lain luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sarana deteksi seperti radar, AIS, *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV), dan satelit, serta lemahnya interoperabilitas antar lembaga maritim seperti Bakamla, KKP, dan Polair (Wijaya & Pratama, M., 2023). Ketidakhadiran kebijakan intelijen maritim yang secara khusus dirancang untuk menghadapi ancaman asimetris membuat respons di lapangan lebih bersifat reaktif daripada preventif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara posisi strategis Natuna sebagai frontier pertahanan maritim Indonesia dengan kapasitas sistem intelijen nasional dalam menjaga kedaulatan wilayah tersebut.

Hasil wawancara dan observasi memperkuat temuan bahwa efektivitas intelijen maritim TNI AL sangat bergantung pada tiga faktor utama: integrasi kelembagaan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi, serta kebijakan strategis yang terarah. Interoperabilitas antar lembaga intelijen masih rendah karena ego sektoral dan perbedaan sistem informasi, sementara personel di tingkat taktis seperti Lanal Ranai masih terbatas baik jumlah maupun keahliannya dalam bidang intelijen maritim. Teknologi deteksi yang belum modern menyebabkan celah dalam pengawasan laut, sedangkan koordinasi lintas lembaga masih bergantung pada komunikasi informal antar perwira. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan intelijen maritim nasional yang integratif dengan TNI AL sebagai *leading sector*, didukung sistem data bersama berbasis *real-time*, peningkatan kemampuan personel, serta modernisasi teknologi deteksi untuk memperkuat daya

tangkal Indonesia terhadap ancaman asimetris di Laut Natuna Utara.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan intelijen TNI AL, notulen rapat koordinasi lintas instansi, regulasi nasional, instrumen hukum internasional, serta publikasi lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Kajian terhadap dokumen internal TNI AL mengungkap mekanisme deteksi dini dan alur pelaporan yang telah berjalan, namun masih dihadapkan pada keterbatasan radar, UAV, dan satelit. Sementara itu, dokumen koordinasi antar lembaga seperti TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair menunjukkan bahwa meskipun forum koordinasi sudah ada, efektivitasnya masih rendah karena perbedaan mandat dan lemahnya interoperabilitas (Sulaiman & Rahmawati, A., 2024). Regulasi nasional dan hukum internasional seperti UNCLOS 1982, UU TNI, UU Kelautan, dan UU Perikanan menunjukkan kekuatan normatif Indonesia dalam menegakkan kedaulatan, tetapi belum diikuti kebijakan operasional yang spesifik terhadap ancaman asimetris seperti maritime militia dan riset ilegal.

Selain itu, dokumen kebijakan pertahanan dan laporan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya pengamanan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis energi nasional. Publikasi FAO serta berita resmi pemerintah memperlihatkan intensitas ancaman nyata berupa IUU fishing dan aktivitas kapal asing tanpa izin di perairan Natuna. Temuan dari seluruh dokumen tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kekuatan regulatif dan implementasi operasional di lapangan. Meskipun kerangka hukum dan doktrin sudah kuat, belum ada integrasi sistem intelijen yang solid antar lembaga. Oleh karena itu, hasil studi dokumentasi ini menegaskan perlunya penguatan peran intelijen maritim TNI Angkatan Laut sebagai aktor utama dalam membangun sistem intelijen maritim nasional yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika ancaman asimetris di Laut Natuna Utara.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif menggunakan NVivo dan analisis strategis melalui metode SWOT. Hasil analisis NVivo menunjukkan tiga temuan utama yang

menjadi hambatan utama peran intelijen maritim TNI AL di Laut Natuna Utara, yaitu lemahnya interoperabilitas kelembagaan antar instansi, keterbatasan SDM dan sarana deteksi modern, serta absennya kebijakan intelijen khusus untuk menghadapi ancaman asimetris seperti maritime militia, kapal riset ilegal, dan IUU fishing. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan sistem intelijen maritim bersifat fragmentaris serta kurang adaptif terhadap dinamika ancaman di lapangan. Meskipun TNI AL memiliki struktur intelijen berlapis dan pangkalan terdepan di Natuna, efektivitasnya masih terhambat oleh koordinasi lintas instansi yang belum optimal dan ketergantungan pada improvisasi lapangan.

Sementara itu, hasil analisis SWOT menempatkan posisi intelijen maritim TNI AL di Kuadran IV (*Weakness-Threats*/WT), yang menunjukkan kondisi defensif di mana kelemahan internal dan ancaman eksternal sama-sama dominan (Putra P., 2025). Skor kelemahan (2,20) lebih tinggi dari kekuatan (1,35), dan skor ancaman (2,10) juga lebih besar dari peluang (1,50). Kondisi ini menggambarkan perlunya strategi defensif-adaptif yang fokus pada integrasi sistem intelijen maritim nasional, peningkatan interoperabilitas antar lembaga, modernisasi sarana deteksi (radar, UAV, dan satelit), serta penguatan kapasitas personel di garis depan. Selain itu, penyusunan kebijakan dan prosedur tetap bersama untuk menghadapi ancaman asimetris mutlak diperlukan agar sistem intelijen maritim Indonesia dapat berfungsi lebih efektif, responsif, dan terkoordinasi dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara.

B. Pembahasan

Pembahasan ini memadukan hasil wawancara, observasi lapangan di Lanal Ranai, serta telaah terhadap dokumen kebijakan dan literatur yang dianalisis menggunakan perangkat NVivo dan metode SWOT. Dari analisis tersebut, teridentifikasi tiga permasalahan utama, yaitu rendahnya tingkat interoperabilitas antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia serta sarana deteksi modern (Sulaiman & Wijaya, A., 2023), dan belum adanya kebijakan intelijen yang secara khusus mengatur penanganan ancaman asimetris seperti maritime militia, kapal riset ilegal, dan IUU

fishing. Ketiga faktor ini saling berhubungan erat dan berimplikasi pada fragmentasi sistem intelijen maritim yang belum mampu beradaptasi secara efektif terhadap dinamika ancaman di wilayah operasi. Walaupun TNI Angkatan Laut memiliki struktur intelijen berlapis serta dukungan pangkalan strategis di Natuna, tingkat efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga dan masih bergantung pada improvisasi di tingkat operasional.

Temuan ini sesuai dengan teori-teori yang digunakan, seperti teori Intelijen Maritim (Lowenthal) yang menjelaskan fungsi intelijen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, teori Ancaman Asimetris (Metz & Johnson) yang menggambarkan pola ancaman non-konvensional di laut, serta teori Interoperabilitas (NATO) yang menyoroti pentingnya sistem informasi terintegrasi antar Lembaga (Lowenthal, 2016). Selain itu, teori Kapabilitas SDM dan Teknologi (Clark, 2019) memperlihatkan bahwa mutu intelijen ditentukan oleh kemampuan personel dan dukungan teknologi. Melalui analisis tematik NVivo dan SWOT, diperoleh kesimpulan bahwa posisi TNI AL berada pada Kuadran IV (*Weakness-Threats*), yang menuntut strategi defensif-adaptif dengan fokus pada integrasi sistem intelijen nasional, modernisasi sarana deteksi, peningkatan kompetensi SDM, dan penyusunan kebijakan khusus ancaman asimetris.

1. Interpretasi

Interpretasi hasil penelitian ini menjelaskan hubungan antara data primer (wawancara, observasi, dokumentasi) dan data sekunder (peraturan, kebijakan, serta penelitian terdahulu) untuk menjawab rumusan masalah tentang peran intelijen maritim TNI AL dalam menghadapi ancaman asimetris di Laut Natuna Utara (NATO, 2018). Melalui analisis NVivo dan SWOT, ditemukan tiga isu utama yang saling berkaitan, yaitu lemahnya interoperabilitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi intelijen, serta ketiadaan kebijakan khusus yang mengatur penanganan ancaman asimetris seperti maritime militia, kapal riset ilegal, dan IUU *fishing*.

Interoperabilitas antarinstansi seperti TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair masih parsial, dengan koordinasi informal yang lebih efektif dibanding forum resmi. Belum

adanya SOP bersama dan sistem data *sharing real time* menyebabkan *Maritime Domain Awareness* (MDA) rendah dan respons terhadap ancaman sering terlambat. Keterbatasan SDM dan teknologi juga menjadi hambatan utama. Jumlah personel intelijen di garis depan masih minim dan belum seluruhnya memiliki kompetensi analisis berbasis teknologi. Sementara itu, sarana deteksi seperti radar, UAV, dan satelit belum memadai dan tidak terintegrasi, sehingga proses deteksi ini belum optimal.

Dari sisi kebijakan, strategi intelijen maritim TNI AL masih bersifat umum dan belum memiliki panduan spesifik untuk ancaman non-konvensional. Regulasi nasional memang memberikan dasar hukum, namun belum diikuti kebijakan operasional lintas instansi. Kondisi ini menempatkan TNI AL pada posisi Kuadran IV (*Weakness-Threats*) dalam analisis SWOT, yang menandakan perlunya strategi defensif-adaptif. Strategi ini menekankan integrasi kelembagaan intelijen maritim nasional, modernisasi sarana deteksi *real time*, peningkatan kompetensi SDM, dan penyusunan kebijakan khusus menghadapi ancaman asimetris (Putra & Nugroho, S., 2024). Dengan langkah tersebut, TNI AL diharapkan dapat memperkuat daya tangkal dan berperan lebih proaktif dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara.

2. Kebijakan, Strategi, dan Upaya

Berdasarkan hasil NVivo dan SWOT, posisi TNI AL berada pada Kuadran WT, sehingga strategi yang tepat adalah defensif-adaptif yang berfokus pada penguatan internal dan mitigasi ancaman eksternal. Kebijakan utama diarahkan untuk mewujudkan sistem intelijen maritim nasional terintegrasi antara TNI AL, Bakamla, KKP, dan Polair melalui pembentukan pusat komando satu pintu, modernisasi sistem deteksi real-time, serta peningkatan kualitas SDM intelijen guna memperkuat MDA.

Strategi yang dihasilkan mencakup tiga langkah utama. Pertama, membentuk pusat komando intelijen maritim nasional satu pintu untuk mempercepat arus informasi dan menghindari duplikasi data (Clark, 2019). Kedua, meningkatkan kapasitas

deteksi *real-time* melalui integrasi radar Bakamla, TNI AL, dan Polair serta pemanfaatan UAV dan satelit. Ketiga, menyusun protap bersama lintas instansi dalam menghadapi ancaman asimetris agar penindakan terhadap IUU *fishing* dan riset ilegal lebih cepat dan terkoordinasi.

Upaya pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan. Jangka pendek (1–2 tahun) meliputi pembentukan *task force* intelijen, penyusunan SOP dasar, dan audit sarana radar. Jangka menengah (3–5 tahun) mencakup pembangunan sistem *Common Operating Picture* (COP), latihan gabungan, dan integrasi radar nasional. Jangka panjang (lebih dari 5 tahun) diarahkan pada pembentukan *National Maritime Intelligence Fusion Center*, penguatan sistem satelit keamanan maritim, serta penyusunan protap nasional lintas instansi. Implementasi kebijakan dan strategi defensif-adaptif ini diharapkan mampu mentransformasi peran TNI AL dari reaktif menjadi proaktif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Interoperabilitas kelembagaan intelijen maritim TNI AL dengan instansi terkait di Laut Natuna Utara masih belum optimal. Koordinasi antar lembaga lebih banyak berlangsung secara informal, sementara forum resmi belum mampu mewujudkan integrasi sistem dan mekanisme berbagi data yang efektif. Akibatnya, kesadaran situasional maritim belum tercapai sepenuhnya, sehingga respons terhadap ancaman asimetris seperti aktivitas maritime militia, riset ilegal, dan IUU *fishing* sering terlambat serta bersifat reaktif.
2. Kesiapan sumber daya manusia dan teknologi intelijen maritim TNI AL masih terbatas. Jumlah personel intelijen di Lanal Ranai relatif sedikit dan belum seluruhnya memiliki kompetensi dalam analisis intelijen modern. Dari sisi teknologi, keterbatasan radar jarak jauh, tidak tersedianya UAV organik, serta minimnya akses terhadap data satelit real time menghambat efektivitas deteksi dini. Kondisi ini memperkuat hasil analisis SWOT yang menunjukkan bahwa kelema-

han internal lebih dominan dibanding kekuatan.

3. Strategi dan kebijakan intelijen maritim dalam menghadapi ancaman asimetris belum terumuskan secara spesifik. Regulasi yang ada seperti UU TNI, UU Kelautan, dan UNCLOS 1982 hanya memberikan dasar hukum umum tanpa panduan teknis operasional. Berdasarkan hasil SWOT, posisi intelijen maritim TNI AL berada pada kuadran *Weakness-Threats* (WT), sehingga strategi yang tepat adalah defensif-adaptif dengan fokus pada pembentukan pusat komando intelijen maritim terpadu, integrasi sistem deteksi *real time*, serta penyusunan prosedur tetap bersama antarinstansi untuk menghadapi ancaman asimetris.

B. Saran

1. TNI Angkatan Laut perlu membentuk pusat komando intelijen maritim terpadu yang berfungsi sebagai simpul koordinasi strategis antara Pusintelal, Koarmada I, dan Lanal Ranai, serta terintegrasi dengan lembaga maritim nasional seperti Bakamla, KKP, dan Polair. Pembentukan pusat komando ini bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas kelembagaan, mengoptimalkan mekanisme pertukaran informasi, dan meningkatkan MDA dalam rangka menghadapi dinamika ancaman di Laut Natuna Utara secara lebih efektif dan terkoordinasi.
2. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya, perlu merumuskan kebijakan nasional yang secara komprehensif mengatur penanggulangan ancaman asimetris di sektor maritim. Kebijakan tersebut harus mencakup pedoman operasional lintas instansi dalam menghadapi maritime militia, aktivitas riset ilegal, dan praktik IUU Fishing, serta didukung oleh alokasi anggaran prioritas untuk modernisasi sistem dan teknologi intelijen maritim nasional.
3. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi intelijen maritim perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program pendidikan dan pelatihan terstruktur, sertifikasi kompetensi, serta penempatan personel profesional di pangkalan terdepan. Selain itu, modernisasi sistem deteksi dan analisis

intelijen berbasis radar terintegrasi, UAV, satelit penginderaan jauh, dan Artificial Intelligence-based data analysis menjadi prasyarat penting guna memperkuat kapasitas deteksi dini dan respons strategis TNI AL terhadap ancaman maritim yang bersifat kompleks dan dinamis.

DAFTAR RUJUKAN

- Clark, R.B.T.-S.I. and N.S. (2019) *Strategic Intelligence and National Security*. Oxford University Press . Available at: <https://global.oup.com>.
- Creswell, J.W. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dao et al. (2024) 'Penanggulangan Praktik Destructive Fishing Melalui Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat', *Marine Research and Analysis Journal* [Preprint]. Available at: <https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/download/14106/9254>.
- Doe, J. (2023) 'Maritime Security and Asymmetric Threats in the South China Sea', *Journal of Maritime Affairs*, 30(1). Available at: <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-maritime-affairs>.
- Lakeman, R. (2008) 'Qualitative Data Analysis with NVivo', *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*. Edited by 2nd, 15(10), pp. 868-868. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2008.01257.x>.
- Lowenthal, M.M.B.T.-I.F.S. to P. (2016) *Intelligence: From Secrets to Policy*. Edited by 8th. CQ Press. Available at: <https://www.sagepub.com>.
- Marliani, R. (2024) 'Strategic Maritime Security in Indonesia: Integrated Approaches to Ocean Governance', *Journal of Ocean Security Studies* [Preprint]. Available at: <https://www.oceansecurityjournal.com>.
- Matthew B. Miles and Johnny Saldaña, A.M.H. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by 3rd. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Panggabean, P. (2025) 'Indonesia's Maritime Defense Strategy for Securing North Natuna 2019-2024', *NPA Formosa Journal* [Preprint]. Available at: <https://npaformosapublisher.org/index.php/fjmr/article/download/124/98>.
- Putra & Nugroho, S., A. (2024) 'Defensive-Adaptive Strategies for Strengthening Maritime Intelligence in Indonesia', *Journal of Strategic Defense and Intelligence* [Preprint]. Available at: <https://www.journalstrategicdefense.com>.
- Putra P., R.& N. (2025) 'Strategic Positioning of Maritime Intelligence: A SWOT Analysis for TNI AL', *Journal of Strategic Defense and Intelligence* [Preprint]. Available at: <https://www.journaldefenseintelligence.com>.
- Security, N.C. and I.A.B.T.-I. in M. (2018) *Interoperability in Maritime Security*. Available at: <https://www.ncia.nato.int>.
- Studies, I.J. of A. (2022) 'Geopolitics of the Indo-Pacific: Challenges and Opportunities', *International Journal of Asian Studies* [Preprint]. Available at: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-asian-studies>.
- Sulaiman & Rahmawati, A., H. (2024) 'Enhancing Maritime Intelligence Coordination: The Case of Natuna', *Indonesian Maritime Policy Journal* [Preprint]. Available at: <https://www.indompolicyjournal.com>.
- Sulaiman & Wijaya, A., R. (2023) 'Challenges in Maritime Intelligence: A Study of TNI AL's Intelligence System in Natuna Waters', *Journal of Maritime Defense Studies* [Preprint]. Available at: <https://www.maritimedefensestudies.com>.
- Waters B (2021) 'Maritime Intelligence: Theory and Practice'. Available at: <https://www.routledge.com/Maritime-Intelligence-Theory-and-Practice/Waters/p/book/9780367338879>.
- Wijaya & Pratama, M., A. (2023) 'Strategic Gaps in Maritime Intelligence: Challenges in Natuna Waters', *Journal of Maritime Security Studies* [Preprint]. Available at: <https://www.maritimsecurityjournal.com>.